

PEMULIHAN USAHA KECIL-MIKRO DAN PENGUATAN PEREMPUAN DI WILAYAH BENCANA

Yuni Pristiwati ¹

Abstract

This essay argues on the importance of gender aspect in recovery process of small enterprises in disaster-affected regions. Cases were drawn from the recovery efforts in Aceh after the tsunami and in Yogyakarta after the earthquake. The main problem in the recovery process in disaster-affected regions is the inexistence of gender aspect. Ignorance of the position of women, both in the daily lives or in economic activities, has caused the recovery program reached the wrong target. It is important to pay attention to women, since in many area women have a second-class position. However, the role of women for their family and business in the disaster-affected region is very important because they are in the position as the last resources in protecting the psychology and economic in the poor households.

Kisah Ketangguhan Perempuan Usaha Kecil Keluar dari Masalah

"...Bagaimana kami mau usaha lagi bu..., rumah kami memang tidak roboh atau hilang seperti yang lain, tetapi modal kami juga habis untuk makan dan kebutuhan keluarga selama sebulan ini..., belum bisa kerja apa-

apa, dagangan kami habis, pelanggan kami hilang—karena pindah dan mereka tidak mampu lagi untuk membeli...." (Maryani-Alue Campli, Shunudhun Aceh Utara).

"...Saya lebih baik kembali lagi ke rumah, meskipun sebagian besar rumah masih rusak, warung saya harus di-

¹ Sekretaris Nasional ASPPUK

perbaiki lagi, dagangan juga habis—di barak kami tidak melakukan apa-apa, apalagi masih ada barang-barang di rumah yang bisa dipergunakan. Sebagian tetangga memang kalau siang kembali—dan malam pulang ke barak...” (Sri Hayati, Ulerebik Barat, Shunudhun Aceh Utara)

“Semua rata dengan tanah—dapur tempat kami masak garam pun hilang, bibit yang kami miliki juga habis... tidak ada sedikitpun yang tersisa.... kami harus mulai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kami tidak punya uang untuk modal..., sebenarnya masih ada pembeli dari luar daerah... pasti masih laku kalau kami buat garam lagi...” (Anggota Kelompok Darasira, Ulerebik Barat, Shunudhun Aceh utara)

Penuturan tiga perempuan di atas adalah sedikit gambaran dari para korban tsunami di Aceh yang sebelumnya memiliki usaha. Mereka adalah tiga dari ribuan pelaku usaha mikro yang mengalami nasib hampir sama yakni kehilangan aset usaha yang telah dirintis dan digeluti sebelum terjadi bencana. Usaha tersebut umumnya menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, sebab penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Para suami biasanya menjadi pendukung

dalam usaha yang mereka lakukan. Ibu Maryani, misalnya, menugaskan suaminya sebagai pengantar dan sekaligus pembawa dagangan kalau dia harus berkeliling menjajakan baju, sementara untuk belanja dan menarik uang baju ke pelanggan bisa dilakukannya sendiri.

“...Lha pripun maleh mbak-nek mboten nyuwun-nyuwun, ...tekne anake nggih betah maem, sakjane nggih isin lha terpaksa pripun malih...” (mau bagaimana lagi kalau tidak mintaminta, anaknya butuh makan, sebenarnya malu tapi terpaksa dilakukakan...). Suwarni adalah korban gempa yang warungnya roboh dan peralatannya rusak. Dia tidak punya persediaan makanan ketika gempa terjadi, dagangannya tak bisa lagi diselamatkan. Ketika hari kedua gempa ketika daerahnya sudah mulai dikunjungi banyak orang, maka dia rela menadahkan tangan untuk meminta uluran tangan para dermawan yang lewat. Lain halnya dengan ibu Watiah yang menyatakan *“...lumayan mbak ... kulo nembe mawon kulakan pas gempa niko, lha sak niki sayur saget kagem piyambak, sebagian diparengke tonggo...”* (lumayan mbak, waktu gempa saya baru saja belanja, jadi sekarang sayur bisa digunakan sendiri dan sebagian diberikan kepada tetangga). Ibu Watiah, seorang peda-

gang sayur keliling, ketika gempa terjadi dagangannya masih aman di atas sepeda sehingga masih bisa diselamatkan dan digunakan untuk beberapa hari. Namun, itu pun tidak berarti aman untuk kelangsungan usahanya, karena modalnya tidak bisa berputar bahkan habis karena tidak ada penjualan.

Cerita perempuan korban gempa dari dua wilayah yang berbeda, yakni Aceh dan Klaten Jawa Tengah, memberikan gambaran kepada kita tentang karakter usaha mikro dan ketangguhan para perempuan. Usaha mikro yang selama ini rentan karena keterbatasannya di berbagai aspek, tetapi sekaligus mereka kuat dalam hal yang sama. Tidak membutuhkan waktu yang relatif lama, para perempuan usaha mikro mengatasi keadaan, mereka segera memulai kembali kegiatannya untuk mendapatkan hasil. Pada hari ketiga di Klaten, misalnya, sudah terlihat ibu-ibu dengan keranjang sayur di sepedanya pergi ke pasar. Pasar-pasar desa sudah mulai tampak aktivitasnya di antara reruntuhan. Begitu juga halnya dengan para perempuan di Aceh dalam cerita di atas. Mereka membutuhkan waktu kurang lebih tiga minggu untuk memulai lagi usahanya.

Aktivitas serupa terjadi pada kelompok ibu-ibu kepala keluarga yang diorganisasi oleh PEKA di Aceh. Mereka juga memulai aktivitasnya sesegera mungkin setelah minggu ketiga. Meskipun mereka lebih konsentrasi untuk membangun kembali rumahnya, tetapi bisnisnya juga tetap mendapatkan perhatian. Tidak hanya itu, keterampilan mereka berorganisasi membuat mereka lebih sigap mengatasi masalah dan melakukan pengorganisasian para korban.

Dalam situasi darurat, baik karena bencana alam maupun konflik, beberapa pengalaman menunjukkan bahwa perempuan cepat bangkit dan menjadi penyelamat bagi keluarga dan kelompok kecil di masyarakat. Pengalaman konflik di Ambon memberikan pelajaran tentang hal ini, para perempuan mencoba membuka jarak dan mengabaikan dua pihak yang bertikai dengan cara membangun kembali ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Yang dilakukan para perempuan adalah membangun kembali pasar dengan menghidupkan perdagangan untuk melayani masyarakat sekitar. Dengan kembalinya aktivitas ekonomi, secara berangsur-angsur hubungan sosial kembali tumbuh dan antar-kelompok yang bertikai, khususnya para perempuan, secara alami mulai menjalin komunikasi kembali. Hal ini

sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Amartya Sen, "*perempuan bukanlah pihak penerima manfaat yang pasif dalam program-program mengembangkan kesejahteraan, tetapi mereka akan menjadi agen perubahan..., mereka akan menjadi pelopor untuk melakukan transformasi sosial.*" (Kompas 29/12/2004).

Perempuan terbukti memiliki peran yang sangat besar khususnya dalam hal ekonomi. Tidak hanya pada situasi aman, dalam situasi sulit atau darurat pun perempuan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena sektor usaha yang dikembangkan berskala mikro. Meskipun di sisi lain karakter tersebut dianggap sebagai masalah, tetapi dalam kenyataannya usaha ini sangat lentur karena tidak membutuhkan dukungan modal yang besar. Selain itu, volume dan jangkauan pasarnya luas sehingga perempuan dapat mengelolanya di antara kesibukan domestik mereka. Oleh karenanya, George Samuel mengatakan bahwa pengembangan sosial melalui kelompok perempuan berarti membangun modal sosial yang sejati. Dalam kelompok kecil perempuan ada semangat *entrepreneurship* antara anggota kelompok.

Untuk memahami lebih lanjut kita bisa simak juga pengalaman perempuan yang lain dalam program pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi nonpemerintah (ornop) di Klaten. Program ini tidak hanya membantu mengembangkan usaha mikro yang dilakukan oleh perempuan, tetapi sekaligus memberikan penguatan untuk peningkatan posisi perempuan. Efektivitas program tersebut tercermin dalam perubahan yang terjadi pada Ibu Supriyani dan Katimah dalam pengalaman berikut:

Ibu Supriyani setiap minggu harus mengirimkan telur asin dari Klaten ke Yogyakarta untuk memenuhi permintaan pelanggan. Usaha ini merupakan salah satu sumber pendapatan keluarga dan sumber pembiayaan aktivitas sosial yang harus dipenuhi. Dia memulai usahanya 10 tahun yang lalu dengan modal yang dikumpulkan dan dipinjam dari kelompoknya. Keterampilan membuat telur diperolehnya dari pelatihan yang diselenggarakan sebuah ornop melalui program pembinaan wanita produktif. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ia mampu mengelola usaha ini, begitu juga halnya dengan usaha "warungan" yang semakin berkembang. Semua usaha tersebut dilakukan bersama suami dan dibantu anak-anaknya se-

bagai penjaga warung. Tidak hanya keterampilan berusaha, interaksinya dengan teman-teman di kelompok dalam dampungan ornop mampu mentransformasikan nilai-nilai baru yang membuat relasinya dengan suami dan masyarakat menjadi lebih setara. Sekarang, Supriyani tidak saja dikenal sebagai pemilik warung dan pembuat telur asin, tetapi dia juga menjadi *organizer* di lingkungannya. Bahkan, dia pula yang memimpin kawan-kawannya untuk bertemu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerahnya menyampaikan aspirasi para perempuan usaha mikro. Kini, setelah lebih 10 tahun Supriyani menekuni usahanya, dia tetap Supriyani-perempuan usaha mikro, bukan pengusaha menengah ataupun besar, tetapi ia semakin hari semakin mengalami pencerahan dan memberikan layanan pemenuhan kebutuhan anak-anaknya dengan baik. (catatan harian TPL PERSEPSI-Klaten, pengamatan, dan wawancara).

"...sakjane kulo namung badhe ngampil Rp20.000, kalih Gapokwan malah diparingi Rp50.000, sedoyo kulo tumbawsne wulu kalih alat-alat kangge ngronce." (Awalnya saya ha-

nya mau pinjam Rp20.000 tetapi oleh Gapokwan (gabungan Kelompok Wanita) saya diberi pinjaman Rp50.000, semua saya belikan bulu ayam dan alat-untuk menyusun bulu ayam menjadi "sulak"/alat pembersih debu).

Dialog di atas adalah awal cerita usaha yang dirintis Katimah, ibu muda dengan satu anak dan suami yang memiliki kerja tidak menentu. Katimah berminat memulai usaha setelah mendapatkan pelatihan dan melihat usaha yang dikembangkan perempuan lain di luar desanya. Ia terdorong untuk hidup layak, punya rumah, bisa makan 3 kali sehari, dan mampu menyekolahkan anaknya. Setelah menyelesaikan produknya, dia menitipkan pemasarannya pada teman tempatnya berguru. Karena si teman ini juga mendorongnya memasarkan sendiri, maka Katimah mulai mencoba. Ia pun belajar naik sepeda dan menjajakan dagangan serta mengambil bahan sendiri hingga ke luar daerahnya (luar kabupaten). Pengalaman tersebut menjadi kenangan yang sangat berharga dalam hidupnya yang selama ini hampir tidak pernah keluar dari kampung tempat tinggalnya. Karena ketekunan dan keuletannya, Katimah mengalami kemajuan seiring

dengan hal tersebut ia pun mendapat tambahan kredit dari Rp50.000 menjadi Rp100.000, Rp200.000, hingga akhirnya lebih dari Rp1 juta. Kredit tersebut digunakan selain untuk menambah modal juga untuk membeli bahan bangunan, sampai akhirnya 3 tahun kemudian Katimah sudah bisa menempati rumahnya sendiri.

Kemajuan di dalam usahanya mendorong Katimah belajar menulis. Ia pun tidak malu belajar dari anaknya, di samping dorongan TPL (tenaga Pendamping lapang dari ornop). Katimah juga mulai merekrut tetangganya untuk menjadi pekerja lepas dan menampung produk-produk sulak dari tetangganya. Sampai suatu saat dia memutuskan untuk menjadi pemasar dan penyedia bahan. Empat tahun seiring dengan perjalanan program ornop pendampingnya, Katimah sudah bisa menunjukkan kepada evaluator gelang emas tiga buah yang dipakainya serta rumah yang diimpikannya. Dia pun telah biasa dan berani memakai lipstik dan pergi naik sepeda sampai keluar wilayah desanya (PERSEPSI 2002).

Problem Usaha Kecil-mikro dan Perempuan

Pengalaman para perempuan di atas memberikan keyakinan kepada kita betapa usaha mikro memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian nasional. Keyakinan ini dikuatkan dengan data yang menunjukkan bahwa 44.621.823 unit usaha atau 99% adalah unit usaha kecil-mikro yang melibatkan rakyat banyak. Belum lagi dilihat dalam kontribusinya menciptakan tenaga kerja. Usaha kecil menyerap 71.187.153 orang atau hampir 99,6% dari total angkatan kerja.² Usaha mikro menjadi sarana pemerataan kesejahteraan rakyat karena jumlahnya besar, biasanya bersifat padat karya, serta meskipun ukuran unitnya kecil tetapi jumlahnya banyak sehingga memungkinkan orang lebih banyak terlibat dan menarik manfaat di dalamnya.

Lebih lanjut berdasarkan fakta jumlah pelaku usaha mikro kurang lebih sebanyak 43%-nya dikelola perempuan (Wawasan 21 Februari 2004). Angka ini diperkirakan lebih besar lagi dengan alasan bahwa yang masuk dalam pendataan statistik adalah usaha yang berstatus formal, sementara da-

3 Departemen koperasi dan UKM 2006 (<http://www.dep.kop.go.id>; diakses 5 Des 2006)

lam realitasnya usaha mikro yang dikelola perempuan tidak demikian. Ada hambatan mobilitas perempuan dalam usaha³ dan bahkan beberapa pengalaman ASPPUK menunjukkan bahwa usaha yang semula dirintis perempuan, setelah berkembang pengelolaan dan kepemilikan formalnya bergeser pada laki-laki karena kebutuhan mobilitas yang tinggi.

Fakta lain menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan perempuan memiliki ciri-ciri yang selanjutnya dikelompokkan sebagai usaha "subsisten", yakni usaha yang hasilnya lebih banyak habis untuk konsumsi sehari-hari. Perempuan melakukan jenis usaha sebagai "pilihan terakhir" di antara keterbatasan pilihan. Bahkan, juga bukan sebagai sarana untuk "mengeksplorasi" naluri "*entrepreneurship*" dalam dirinya, melainkan karena tidak ada pilihan lain bagi mereka. Bila mereka tidak bekerja atau menjalankan usaha, maka pemenuhan kebutuhan rumah tangganya terancam. Usaha

yang dijalani rakyat sebagaimana diuraikan tadi disebut Usha Jumani sebagai "*subsistence cum commercial economy*"⁴. Usaha ini dicirikan dengan skala usaha yang diperjualbelikan dalam skala mikro, relasinya dengan orang-orang yang sudah dikenal, perjanjian dan transaksi dilakukan langsung dengan orang yang dapat dipercaya/dipertanggungjawabkan, aturan main yang sangat spesifik sesuai kebutuhannya, dan, biasanya, barang-barang yang diperdagangkan adalah jenis kebutuhan pokok. Selanjutnya, ciri-ciri marginal dan subsisten ekonomi yang dijalankan perempuan dalam konteks ini biasanya sektor yang dekat dengan fenomena kemiskinan di pedesaan, karena dalam proses modernisasi perempuan seringkali kehilangan bidang kegiatan. Pekerjaannya dianggap berproduktivitas rendah serta tidak termodernisasi, dengan indikasi upah rendah dan struktur hulu hilir yang cenderung eksploitatif.⁵

- 3 Hambatan mobilitas usaha ini terkait erat dengan masalah-masalah gender, misalnya ketika perempuan ingin memperluas daerah pemasaran, belum tentu suaminya mengizinkan ia banyak meninggalkan waktu atau sering pergi ke luar daerah karena alasan anaknya tidak ada yang mengawasi atau kekhawatiran terhadap keselamatannya. Begitu pula dengan urusan usaha, tidak jarang permintaan pelanggan bisa terabaikan kalau urusan anak-anak dan rumah tangga belum beres. Bagi perempuan hal tersebut akan lebih "aman", sementara hal ini berdampak dalam pengembangan usahanya.
- 4 Usha Jumani dalam tulisan Firdaus: "**Memperkuat Usaha dengan Jejaring**" memetik pengalaman jejaring Perempuan Usaha Kecil-mikro; makalah yang disampaikan dalam seminar tentang "**Peran Lembaga Non Pemerintah dalam upaya Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi**" yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan rakyat, Juli 2004.
- 5 Lebih lanjut lihat Grijns at all. 1994. *Different women, different work: gender and Industrialisation in Indonesia*. Hans and Vermont: Avebury.

Usaha kecil (didalamnya termasuk mikro) memiliki berbagai masalah yang oleh Tambunan⁶ dilihat dari keterbatasan modal, bahan baku, penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, informasi, dan pemasaran. Lebih khusus menyangkut masalah SDM usaha kecil-mikro bercirikan produktivitas rendah, etos kerja dan disiplin rendah, penggunaan tenaga kerja yang eksploitatif, mengandalkan keluarga sebagai tenaga yang tidak dibayar, serta sulit mengakumulasi modal karena nilai tambah rendah dan pengelolaan keuangan yang buruk. Secara eksternal masalah yang dihadapi oleh usaha kecil-mikro berkaitan dengan relasi mereka terhadap lembaga di luar mereka. Masalah lingkungan dan berbagai kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta pemberian fasilitas, dukungan, pelayanan, dan perlindungan berujung pada sulitnya usaha kecil mengakses berbagai pelayanan yang ada, termasuk layanan pinjaman.

Dari sisi internal, permasalahan modal menjadi masalah yang sangat me-

nonjol. Terkait dengan permasalahan sulitnya akses modal, ASPPUK dalam survei yang dilakukan pada tahun 2003 terhadap 2177 orang perempuan usaha kecil yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa 86,6% usaha kecil-mikro belum pernah mendapatkan akses modal karena alasan prosedur rumit dan tidak memiliki aset untuk agunan. Begitu halnya akses terhadap program pada umumnya seperti pelatihan keterampilan, informasi, maupun pengembangan pasar. Keadaan ini terkait dengan permasalahan khas usaha kecil seperti tidak dimilikinya agunan dan catatan keuangan. Bagi perempuan lebih spesifik lagi agunan tersebut berhubungan dengan hak kepemilikan dan pola relasi suami istri yang patriarkis.⁷ Tidak hanya dalam aspek modal, permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pelaku usaha kecil-mikro lebih kompleks.

Kompleksitas permasalahan perempuan usaha kecil-mikro bersumber pada permasalahan pembedaan gender, yang berdampak pada masalah

6 Tambunan Tulus T.H. 2002. *Usaha kecil dan menengah Indonesia; beberapa isu penting*. Jakarta, Salemba empat.

7 Dalam tatanan relasi yang patriarkis, dalam suatu rumah tangga biasanya kepemilikan dan pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan sebagai pelaku usahapun tidak memiliki otoritas, bahkan tidak jarang perempuan juga menempatkan dirinya pada posisi submisif sehingga dia tidak berani mengambil keputusan secara mandiri.

ketidakadilan gender⁹ sebagaimana diterangkan Fakih yakni adanya marginalisasi, subordinasi, eksploitasi, stereotip, dan kekerasan. Stereotip perempuan sebagai makhluk domestik berpengaruh terhadap motivasi dan upayanya dalam pengelolaan usaha. Perempuan umumnya menganggap kegiatan usaha yang ditekuni sebagai "pekerjaan sampingan". Selain itu, dengan kegiatan usaha berarti akan menambah beban perempuan, membuatnya tereksplorasi, dan tidak jarang pula mengalami kekerasan.

Beberapa pengalaman lapangan menggambarkan beragam permasalahan gender yang dihadapi oleh perempuan usaha kecil. Misalnya sering diungkapkan "...saya jadi sebel, setiap saya pergi belanja, pedagang kelapa itu saya lihat suka menggoda pembelinya, kadang mencolek-colek, hingga suatu hari saya lawan dia... dan sejak itu tidak berani lagi menggoda saya, dia bilang eh... "galak banget....". Begitu penuturan Umbar Sihani, pedagang sayur keliling yang mengalami pelecehan oleh pedagang besar tempatnya belanja. Tidak hanya di pasar, mereka yang berdagang di rumah pun tak luput dari upaya pelecehan sekaligus penipuan seperti

yang dialami oleh Sri Mulyani yang menjadi pengecer minyak. Tuturnya "...awalnya saya tidak menyangka mbak... saya kira biasa, setiap datang untuk mengirim minyak mereka berdua, satu orang melayani dan yang satu selalu ngajak saya ngobrol, lama-lama yang satu ini suka pegang-pegang dan nggodain saya... hingga suatu hari berani meraba-raba paha saya, akhirnya saya beranikan diri untuk menegurnya... eh setelah saya cek... ternyata takaran minyaknya tidak penuh-kurang 5 liter...." Lebih lanjut, "Saya baru sadar kalau selama ini telah ditipu". (PERSEPSI Klaten 1996, tidak diterbitkan).

Handayani mengalami permasalahan yang lebih kompleks. Selain eksploitasi tenaga, ia juga mengalami kekerasan ekonomi dan seksual. Handayani mendapatkan modal dagang dari pinjaman koperasi. Semenjak usahanya berkembang, Handayani semakin berat pekerjaannya, dia masih harus mengurus rumah dan mengelola usahanya. Anak-anaknya tidak semua mau membantu. Pada saat yang sama, suaminya terkena PHK yang untuk menutupi rasa malu sang suami tiap hari masih saja keluar rumah seolah-olah bekerja dengan biaya trans-

8 Lebih lanjut baca dalam buku Mansour Fakih. 2000. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.

port dari istri. Karena terlalu lelah, Handayani malas untuk melakukan hubungan dengan suami. Sebagai dampaknya, si suami marah, *ngambek*, dan bahkan mengganggu dagangannya.⁹

Hertin Muryono semakin terlilit utang. Usahanya selalu gagal karena modalnya selalu habis untuk biaya makan dan biaya sekolah anaknya. Apalagi sejak suaminya kawin lagi dan dia mengadakan hal ini ke kantor suaminya. Suaminya mendapat sanksi di-PHK. Karena itu, Ibu Hertin harus menanggung biaya hidup anaknya dari kemampuannya menjahit dan membuka warung. Awalnya, usaha warung cukup berkembang, tetapi lama-lama modalnya habis karena harus digunakan untuk membiayai anaknya yang bersekolah di luar kota. Semakin hari kehidupan ekonomi Ibu Hertin semakin sulit. Tidak hanya itu, karena lilitan utang dia pun tidak berani pergi ke pertemuan kelompok. Sementara itu, suami menyalahkan tindakannya yang telah mengakibatkan dirinya di-

PHK. Masalah ibu Hertin adalah cermin proses pemiskinan terhadap perempuan, sekaligus masalah lain yang saling berkait menimpa dirinya.¹⁰

Dari berbagai pengalaman perempuan usaha kecil, khususnya yang difasilitasi oleh ASPPUK, Murniati¹¹ menyebutkan bahwa permasalahan Perempuan Usaha Kecil (PUK) berkaitan dengan berbagai hal yakni:

- Watak konsumtif yang didesak oleh budaya global telah menggeser peran perempuan pada sektor produksi dan distribusi menjadi konsumen;
- kegiatan ekonomi perempuan belum berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang mengakui penghargaan ekonomi dari sudut pandang perempuan;
- politik pembangunan telah menghasilkan pandangan yang hanya mengakui bentuk usaha ekonomi besar, sementara usaha kecil-mikro masuk dalam sektor nonformal;

⁹ Kisah-kisah problem perempuan usaha mikro sebagaimana dituliskan dalam catatan harian para pendamping lapang; penulisan catatan harian ini menjadi salah satu kewajiban para pendamping yang bergabung dalam program "Penguatan usaha Kecil-mikro dengan perspektif gender" yang dikelola oleh PERSEPSI sejak 1994—2002". Catatan harian merupakan sumber informasi yang digunakan untuk merancang serta menjadi alat monitoring dan evaluasi terhadap capaian program pemberdayaan.

¹⁰ Problem-problem lain banyak ditulis dalam catatan harian pendamping lapang dan telah diterbitkan oleh PERSEPSI dalam 3 buah buku lebih lanjut bisa dibaca dalam *Menggapai Dunia*, Winarni dkk, tahun 2002.

¹¹ Murniati dkk. *Gerakan Ekonomi Perempuan sebagai Basis Ekonomi Rakyat* (sebuah refleksi pengalaman lapang). PT Binarena Pariwara, ASPPUK, CUSO, PPSW: Jakarta, 2001.

- paham yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berfungsi sebagai ibu dalam masyarakat telah menjauhkan perempuan dari dunia usaha,
- budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan stereotip dan berakibat pada pembatasan akses terhadap sumberdaya dan informasi,
- peran ganda dinilai sebagai hambatan menjalankan usaha. Beban ini membuat perempuan tidak leluasa melakukan pekerjaan yang sifatnya publik, khususnya fungsi ekonomi.

Pengembangan Usaha Kecil-mikro dan Penguatan Perempuan

Membahas masalah usaha kecil-mikro sangat erat dengan membahas permasalahan yang dihadapi perempuan sebagai pelaku mayoritas. Dalam pengembangan usaha kecil-mikro telah banyak dilakukan upaya, baik oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Bahkan dalam

dokumen rencana pembangunan disebutkan bahwa usaha kecil menjadi salah satu prioritas pembangunan. Meskipun secara umum kebijakan pemerintah tentang usaha kecil telah ada, tetapi belum benar-benar dilaksanakan secara efektif sebagaimana ditemukan dalam penelitian AKATIGA bahwa “berbagai program pengembangan usaha kecil yang disalurkan pemerintah hampir tidak dapat dirasakan efektivitasnya”. Tidak efektifnya program ini karena hanya terbatas pada dukungan kredit dan adanya praktik-praktik penyimpangan dalam penyaluran program.¹² Dalam program pengembangan usaha kecil yang dikelola perempuan, tampaknya tidak semua pihak jeli melihat kompleksitas permasalahan. Belum dilihatnya permasalahan praktis dan strategis usaha kecil-mikro dan perempuan berpotensi pada ketidakefektifan program. Tidak saja kegagalan, hal itu bahkan bisa menjadi “pukulan balik” bagi perempuan. Penguatan ekonomi usaha kecil-mikro diasumsikan bisa secara otomatis meningkatkan posisi perempuan, namun tidak selalu demikian

12 Yuni Pristiwati “Strategi Pengembangan Usaha Kecil-Mikro untuk Penguatan Perempuan” makalah yang disampaikan untuk pengantar diskusi dalam rapat koordinasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi Keluarga di Kawasan Timur Indonesia, Kantor Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 9 Mei 2005. Lebih lanjut tentang program-program pemerintah untuk pengembangan usaha kecil-mikro bisa dilihat dalam tulisan Fajar Nursaid “*Membangun Kesempatan Berusaha bagi rakyat Miskin*”, kertas kerja yang disampaikan untuk konsultasi nasional Commission on Legal empowerment of the Poor (CLEP), sektor Dunia Usaha, diselenggarakan oleh YLBHI, Jakarta 23—24 November 2006.

dalam realitanya. Dalam pengalaman anggota ASPPUK bahkan bisa berdampak pada eksploitasi perempuan.

Pengalaman di atas salah satunya ditemukan dalam program PERSEPSI (Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial) yang memulai kegiatannya sejak 1984–2002, dengan program awal “Pembinaan Wanita Produktif”. Dalam waktu 6 tahun program dievaluasi. Studi evaluasi yang dilakukan tahun 1990 menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan pendapatan atau perekonomian perempuan, tetapi belum mampu mempengaruhi perubahan posisi perempuan baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Bahkan ditemukan adanya eksploitasi terhadap perempuan.¹³ Sebagai gambaran, dari beberapa anggota kelompok dampingan ditemukan ada 14 aktivitas sosial yang dilakukan perempuan, sementara mereka masih harus menjalankan peran domestiknya. Untuk bisa melakukan aktivitas sosial tersebut para perempuan harus pandai-pandai mengatur waktu, sehingga ketika mereka pergi pekerjaan rumah tangga harus sudah diselesai-

kan, jika tidak ingin mendapati para suaminya marah, atau bahkan akan dilarang ikut kegiatan di luar rumah.

Dalam situasi aman keadaan di atas bisa terjadi, apalagi dalam situasi pascabencana ketika bangunan ekonomi dan sosial keluarga dalam kondisi rentan. Keadaan ini tidak memungkinkan perempuan mengalami masalah yang lebih sulit. Mereka harus berperan sebagai “konselor” bagi anak-anaknya, sekaligus untuk dirinya sendiri dan keluarga besarnya. Begitupula dalam aspek ekonomi, sebagaimana dilakukan seorang ibu dalam cerita di atas yang rela “meminta-minta” agar anaknya tidak kelaparan.

Strategi Pengembangan Usaha Kecil-Mikro dan Penguatan Perempuan dalam Keadaan “Normal” Maupun Pascabencana

Sebagaimana dipahami bahwa permasalahan gender bisa terjadi pada perempuan dalam kelas dan waktu yang berbeda, begitu halnya pada perempuan dalam usaha kecil-mikro. Apabila tetap meyakini bahwa keter-

¹³ Program ini dilakukan dengan asumsi masyarakat miskin perlu peningkatan ekonomi, perempuan dianggap masih memiliki waktu luang sehingga perlu di-“produktif”-kan. Dengan membekalinya keterampilan ekonomi rumah tangga mendorong perempuan untuk memiliki usaha, tetapi tetap menjalankan fungsi domestiknya. Lebih lanjut lihat tulisan Studi Perempuan Pedesaan di Klaten, Adrani dkk, 1990, Laporan Penelitian untuk LP3ES, tidak diterbitkan.

batasan akses ekonomi merupakan salah satu alasan ketimpangan posisi perempuan, maka pengembangan ekonomi bisa menjadi salah satu strategi untuk penguatan perempuan. Tetapi, seperti pengalaman para anggota ASPPUK, peningkatan ekonomi tersebut ternyata tidak semata-mata dan secara otomatis menjadi jaminan untuk mencapai kekuatan bagi perempuan, karena masalah relasi gender tidak hanya bersumber dari faktor keterbatasan ekonomi. Untuk itulah, dalam pengembangan program dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan holistik dalam beberapa aspek. Setidaknya pengalaman PERSEPSI menjadi rujukan disamping pengalaman anggota ASPPUK lain seperti PPSW, LP2SD, Sada Ahmo, maupun LP3M. Pengalaman tersebut didokumentasikan dalam buku pengalaman lembaga masing-masing dan tampak pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ASPPUK bersama AKATIGA, serta dalam refleksi pengalaman para pendamping lapang anggota ASPPUK di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Dari pengalaman-pengalaman di atas diyakini bahwa penguatan ekonomi dengan perspektif gender menjadi

strategi penguatan perempuan, baik dalam situasi normal maupun pada wilayah bencana. Dr. Hesti Wijaya dalam laporan evaluasi program PERSEPSI menyatakan bahwa pendekatan pengembangan pada aspek ekonomi dengan perspektif gender menggunakan pendekatan kelompok dan mengembangkan model pelatihan yang dirancang secara partisipatif dengan menggunakan media kreatif terbukti efektif dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi perempuan.¹⁴ Lebih lanjut, pendekatan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengorganisasian, yakni mengembangkan kekuatan perempuan, khususnya PUK, dalam wadah organisasi kelompok. Pada kelompok yang aktif terjadi proses pembelajaran yang memungkinkan terbangunnya kesadaran kritis. Untuk membangun kekuatan kolektif maka perlu dilakukan pendampingan melalui kelompok maupun pendekatan secara individual agar terjadi proses transfer informasi. Transfer informasi perlu pula dilakukan melalui pelatihan-pelatihan informal dan terstruktur.

¹⁴ Hesti Wijaya dan BW. Widada. 1996 Laporan evaluasi Program Peningkatan Usaha Kecil Perempuan yang Berperspektif Gender. Laporan untuk PERSEPSI. Tidak diterbitkan.

Pelatihan dirancang atas hasil penilaian kebutuhan. Selanjutnya, dalam prosesnya mengedepankan pengembangan metode belajar orang desa yang partisipatif, jenis pelatihan bisa dikelompokkan ke dalam jenis pelatihan motivasional, pengembangan kesadaran, dan keterampilan. Misalnya untuk pelatihan keterampilan usaha diberikan pelatihan perencanaan usaha, manajemen usaha, peningkatan mutu produk, dan penganekaragaman produk. Untuk pelatihan penyadaran diberikan pelatihan pengenalan konsep gender, hak-hak perempuan, dan pendidikan politik. Sedangkan pelatihan yang bersifat motivasional contohnya adalah pelatihan pengembangan sikap-sikap kewirausahaan.

Dalam situasi pascabencana, kelompok ini juga difungsikan sebagai *trauma healing* dan wahana membangun kembali modal sosial yang pernah dimiliki komuniti. Tidak jarang terjadi ketegangan dalam hal pembagian bantuan. Oleh karena itu kelompok menjadi alternatif wahana komunikasi untuk mengelola distribusi bantuan dan upaya pemulihan lainnya.

b. Pelayanan modal adalah tindakan alternatif untuk menjawab kebutuhan akan keterbatasan akses terhadap modal. Dalam program pengem-

bangun usaha sekaligus untuk penguatan modal, layanan modal juga harus diarahkan pada pencapaian kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Di ASPPUK dikembangkan skema kredit untuk usaha dan untuk kebutuhan khusus perempuan agar mendukung usaha. Pada wilayah bencana, skema kredit juga hendaknya mengakomodasi kebutuhan nyata lain. Saat ini sedang dikembangkan layanan modal untuk pemulihan kembali perkakas dan sarana usaha. Ada yang bersifat hibah, tetapi ada pula yang sifatnya pinjaman dengan bunga subsidi. Perbedaan perlakuan ini menjadi kebijakan di kelompok.

Sebagaimana dilakukan oleh Koperasi SETARA di Klaten, modal usaha diberikan kepada anggota yang usahanya hancur dan modalnya habis untuk pembangunan kembali rumahnya. Dengan modal baru, anggota yang bersangkutan bisa memulai lagi usahanya dalam waktu 2 bulan pascagempa. Layanan kredit memang ditujukan untuk modal usaha, sedangkan untuk kepentingan bahan makan, peralatan rumah, dan perkakas serta sarana usaha juga mendapatkan bantuan. Koperasi SETARA yang juga mendistribusikan bantuan untuk kepentingan tersebut. Dengan kata lain, layanan modal untuk pemulihan usaha pascabencana tidak bisa

menjadi satu-satunya upaya pemulihan kembali usaha.

Pelayanan modal dalam kepentingan strategis dilakukan dengan cara mendorong perempuan menghimpun kekuatan modal sendiri. Proses pengorganisasian dalam mengelola layanan modal terbukti efektif pula. Tidak hanya kepentingan modal, tetapi juga organisasi layanan modal/lembaga keuangan bagi perempuan merupakan media yang efektif pula dalam peningkatan kesadaran kritis, solidaritas, dan kepercayaan diri perempuan. Sebagaimana penuturan beberapa anggota LKP (Lembaga Keuangan Perempuan) yang diinisiasi ASPPUK dalam pendiriannya, diakui efektif untuk pemberdayaan di atas.¹⁵

Pembentukan LKP, sebagai media pemberdayaan ekonomi perempuan, bermanfaat untuk menyediakan pinjaman dengan mudah, baik untuk usaha maupun bukan usaha, yang sebelumnya sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkannya dari pihak lembaga keuangan formal. Kasus di Lombok memperlihatkan bahwa LKP ternyata dapat menghindarkan seba-

gian besar anggotanya dari jerat rentenir.¹⁶ Selain itu, LKP pun bermanfaat bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga. Setelah menjadi anggota LKP, mereka dapat meminjam uang untuk modal usaha dan bertindak sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap hasil keputusannya tersebut. Mereka bebas mengajukan permohonan pinjaman, baik dengan statusnya sebagai perempuan yang belum menikah, janda, atau pun bersuami.

c. Pengembangan layanan Pasar.

Pasar dalam pengertian ini memiliki arti yang luas, bisa berupa tempat pemasaran, berupa kesempatan untuk anggota memasarkan barang-barang produknya, maupun berupa layanan informasi pasar. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi alternatif pemecahan masalah keterbatasan akses pasar bagi perempuan karena berbagai alasan yang dihadapi perempuan. Layanan pasar diberikan dengan membentuk lembaga atau unit kerja pemasaran yang dibutuhkan untuk jenis produk dan kapasitas tertentu. Bisa juga sebagai lembaga perantara antara kelompok sebagai produ-

¹⁵ Baca *Best Practice LKP (Lembaga Keuangan Perempuan) ASPPUK*, ASPPUK, 2005.

¹⁶ Sebelum bergabung dengan Jarpuk dan bisa mengakses LKPUK, PUK-mikro di Lombok cenderung meminjam dari rentenir dengan bunga rata-rata 30% per seratus hari. Meski memberatkan, mereka sering kali terpaksa karena tidak memiliki pilihan lain akibat tidak memiliki tabungan dan tidak bisa pula meminjam ke bank. Bahkan tak jarang meminjam kepada kerabat pun dikenakan bunga meski tidak sebesar rentenir.

sen dan pihak lain dalam tujuan pengembangan wilayah dengan volume pemasaran tertentu. Dalam pilihan model ini, yang perlu dijaga adalah kepemilikan lembaga ini berbasis pada anggota.

Layanan pengembangan pasar bisa juga berupa pemberian informasi terkait dengan lokasi baru, perkembangan harga jual dan bahan baku, maupun informasi tentang rekanan untuk pengembangan relasi. Proses perluasan pasar terbukti bisa menjadi media membangun kepercayaan diri.

d. Pelayanan Informasi. Strategi ini dimaksudkan sebagai unit pendukung dalam pengembangan usaha maupun untuk keutuhan pemberdayaan dan bahkan advokasi. Unit ini memiliki tugas menyediakan, mengolah, dan menyebarkan informasi agar sampai kepada pengguna dengan baik dan tepat. Misalnya, agar produsen makanan bisa memproduksi makanan yang sehat, maka perlu ada informasi tentang bahaya bahan pewarna dan pengawet. Dalam konteks kebutuhan khusus perempuan, informasi kesehatan yang berhubungan dengan masalah mereka sangat berharga sebab masalah kesehatan berkaitan erat dengan kegiatan usaha perempuan.

Dalam lingkup kondisi pascabencana, informasi yang disediakan terkait dengan cara mengatasi ataupun antipasi masalah bencana, informasi bantuan, maupun posko-posko kesehatan merupakan produk informasi khusus dan praktis yang sangat berharga bagi masyarakat.

e. Advokasi. Pemahaman advokasi dalam hal ini adalah upaya mengubah agar masalah-masalah strategis dan struktural terkait dengan perempuan usaha kecil-mikro bisa diatasi. Setidaknya ada perubahan ke kondisi yang lebih baik. Dalam lingkup strategi ini yang dilakukan adalah membangun kekuatan jaringan dengan pihak-pihak terkait atau *stakeholder* yang relevan. Seperti yang dilakukan beberapa jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) yang melakukan desakan kepada pihak pemerintah daerah dalam hal proses perencanaan APBD dan pengalokasian anggaran. Ada beberapa kegiatan yang berdampak pada perubahan anggaran untuk kepentingan modal usaha Jarpuk. Dalam hal ini yang mereka perjuangkan adalah peningkatan akses modal bagi perempuan.

Pada situasi bencana, para anggota koperasi mengalami kesulitan dalam pengembalian kredit. Mereka melakukan lobi untuk pembebasan kredit se-

bagaimana janji pemerintah, meskipun tidak semua permintaan dikabulkan, setidaknya dari kesepakatan akan ada keringanan dalam pengembalian kredit. Pemilihan strategi ini sangat terkait dengan strategi lain, utamanya adalah dalam pengorganisasian. Kualitas pengorganisasian menjadi kunci, karena di situlah awal dibangunnya kesadaran kritis dan media memperkuat solidaritas. Akan halnya jaringan, jaringan merupakan faktor lain yang tak kalah pentingnya, sebab jaringan tersebut yang kemudian bisa memperluas isu dan kekuatan, misalnya jaringan dengan media ataupun orang-orang kunci.

Dalam pengalaman ASPPUK kelima strategi di atas harus dilaksanakan secara konsisten disertai prasyarat kelembagaan serta staf yang memiliki komitmen dan konsisten dalam perjuangannya. Mereka harus memiliki empati, perspektif, dan keberpihakan gender yang jelas.¹⁷ Strategi di atas adalah alternatif, setidaknya seperti yang diyakini dan diterapkan oleh sebagian anggota ASPPUK dan selanjutnya menjadi strategi ASPPUK dalam penguatan perempuan usaha kecil.



Daftar Rujukan

- Fakih, Mansour. 2000. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Firdaus. 2004. Memperkuat Usaha dengan Jejaring: memetik pengalaman jejaring perempuan usaha kecil-mikro. Makalah yang disampaikan dalam seminar "Peningkatan Peran Lembaga Nonpemerintah dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi". Diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan rakyat, Juli.

¹⁷ Tentang prasyarat lembaga dan orang-orang yang bekerja untuk aktivitas pengembangan usaha kecil-mikro dan pemberdayaan perempuan-lebih lanjut bisa disimak dalam serial buku pengembangan usaha kecil "**Memotong Jerat Tradisi**", Adriani dkk, Swiss Contact, Jakarta, 2002.

- Fernandez, Joe. 2005. "ASPPUK Best Practices". *Pengalaman Pendampingan Perempuan Usaha Kecil*. Jakarta: ASPPUK-TDH.
- Grijns, at all. 1994. *Different women, different work: gender and Industrialisation in Indonesia* Hans and Vermont: Avebury.
- Murniati, dkk. 2001. *Gerakan Ekonomi Perempuan sebagai Basis Ekonomi Rakyat* (sebuah refleksi pengalaman lapang). Jakarta: PT Binarena Pariwara, ASPPUK, CUSO, PPSW.
- Nursaid, Fajar. 2006. Membangun Kesempatan Berusaha bagi rakyat Miskin. Kertas kerja yang disampaikan untuk konsultasi nasional Commision on Legal empowerment of the Poor (CLEP), sektor Dunia Usaha, diselenggarakan oleh YLBHI, Jakarta 23—24 November.
- Pristiwati, Yuni. 2005. Strategi Pengembangan Usaha Kecil-Mikro untuk Penguatan Perempuan. Makalah yang disampaikan untuk pengantar diskusi dalam rapat koordinasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi Keluarga di Kawasan Timur Indonesia, Kantor Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 9 Mei 2005.
- Sumantri, Adriani, dkk. 2002. *Memotong Jerat Tradisi*. Serial buku pengembangan usaha kecil. Jakarta: Swiss Contact.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha kecil dan menengah Indonesia; beberapa isu penting*. Jakarta: Salemba empat.
- Wijaya, Hesti dan BW. Widada. 1996. Laporan evaluasi Program Peningkatan Usaha Kecil Perempuan yang berperspektif Gender. PERSEPSI. Tidak diterbitkan.
- Departemen koperasi dan UKM. 2006. <<http://www.dep.kop.go.id>> diakses 5 Desember 2006.